

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	MEJA APIP	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	INSPEKTORAT DAERAH	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN SINJAI		
Nama Inovator	Andi adeha syamsuri, ap., s.ip., m.si., cgcae		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Implementasi: Inovasi MEJA APIP dikembangkan karena permasalahan yang timbul pada layanan consulting yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai serta kurangnya Kesadaran OPD dan Unit Kerja lainnya untuk mengkonsultasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui inovasi ini dihadirkan Aksi Strategis MARI MENDEKAT Agar OPD dan Unit Kerja Lainnya Menjadi Lebih Dekat Dengan Inspektorat dan Senantiasa Mengkonsultasikan Berbagai Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Untuk Meminimalisir Temuan dan kerugian Keuangan Negara. Dampak: Inovasi MEJA APIP berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu fungsi dari layanan consulting pada inspektorat, meningkatnya dorongan kesadaran dari OPD dan unit kerja lainnya untuk mengkonsultasikan berbagai macam program kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan database tindaklanjut temuan, pada 2020 temuan sebanyak 15 kerugian negara 2 milyar, pada 2021 temuan sebanyak 98 dengan kerugian 1,85 milyar dan tahun 2022 jumlah temuan sebanyak 43 dengan kerugian sebesar 995 Juta. Kesesuaian Kategori: Inovasi MEJA APIP memberikan persepsi mutu layanan konsultasi pengawasan secara keseluruhan kepada Desa dan OPD serta unit kerja lainnya. Pelayanan konsultasi dan asistensi merupakan layanan utama sebagai upaya efektif untuk meminimalisir temuan dan potensi kerugian keuangan Negara yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan Good and Clean Governance pada Kabupaten Sinjai. MEJA APIP menjawab tantangan tentang pentingnya kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan.

Link <https://youtu.be/m3RYyW4iWwA>

2. Ide Inovatif

Latar Belakang: Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sinjai yang bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Menjalankan tugas pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting memberikan solusi dan saran terkait masalah pembagunan dan keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Unit Kerja lainnya. Permasalahan utama yang dihadapi yaitu terbatasnya pemahaman SDM di Desa dan unit kerja lainnya dalam Melaksanakan Program dan kegiatan yang masuk dalam rencana kerja, maka dari itu Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai menggagas inovasi dengan Mengubah Wajah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (MEJA APIP) melalui strategi aksi layanan konsultasi MARI MENDEKAT guna mendorong kesadaran Desa, OPD dan Unit Kerja lainnya untuk mengkonsultasikan program & kegiatan yang akan dilaksanakan agar meminimalisir potensi kerugian Negara. Disertai dengan terbatasnya jumlah SDM APIP dalam menjangkau semua wilayah kerja yang tersebar di kepulauan dan pegunungan, adanya inovasi MEJA APIP menjadikan Desa, OPD dan Unit Kerja lainnya berada dalam jangkauan. Pendekatan ini memperkuat paradigma pengawasan baru yaitu mengedepankan peran konsultasi dan pendampingan. Tujuan : Tujuan layanan konsultasi ini dibentuk untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, mendorong Desa, OPD dan Unit

Kerja lainnya untuk proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan, serta mempercepat proses pelaksanaan tindaklanjut dengan kehadiran Layanan Konsultasi Pengawasan MARI MENDEKAT Menjadikan OPD dan Unit Kerja Lainnya lebih dekat dengan Inspektorat yang menghadirkan wajah baru bagi Inspektorat dalam hal pengawasan. Kesesuaian Kategori: Inovasi MEJA APIP memberikan persepsi mutu layanan konsultasi pengawasan secara keseluruhan kepada Desa dan OPD serta unit kerja lainnya. Pelayanan konsultasi dan asistensi merupakan layanan utama sebagai upaya efektif untuk meminimalisir temuan dan potensi kerugian keuangan Negara yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance pada Kabupaten Sinjai. MEJA APIP menjawab tantangan tentang pentingnya kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan.

Link https://drive.google.com/file/d/1Kcp8-MQZBWfA2BJTzbUY7tfoZfDazm_d/view?usp=sharing

3. Signifikansi

Deskripsi Implementasi Inovasi: MEJA APIP melalui layanan konsultasi yang disebut MARI MENDEKAT yang merupakan peran inspektorat kabupaten sinjai melalui pelaksanaan konsultasi, sebuah peraturan bupati tentang pelayanan konsultasi pengawasan yang dijadikan APIP sebagai pedoman dalam hal layanan konsultasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan terus bergerak mengikuti kebutuhan perkembangan dunia pengawasan. APIP diharapkan mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai membuka layanan konsultasi bagi pemerintah desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Layanan ini adalah dalam rangka Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system (memberi peringatan dini) dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan memang perlu adanya layanan konsultasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. layanan konsultasi pengawasan ini merupakan implementasi dari APIP dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pada pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja lainnya di wilayah Kabupaten Sinjai. Fungsi Layanan konsultasi ini adalah memberikan pelayanan konsultasi sebagai upaya preventif dan pelayanan konsultasi tindaklanjut. Adapun tujuan khusus mengapa layanan konsultasi ini di bentuk, pertama untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, kedua mendorong organisasi perangkat daerah (OPD)/unit sekolah/pemerintahan desa untuk proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, ketiga untuk meminimalkan temuan pemeriksaan, serta mempercepat proses pelaksanaan tindaklanjut. Disamping itu, layanan konsultasi pengawasan ini dalam pelaksanaan pelayanan konsultasinya berdasarkan kepada wilayah pembinaan dan pengawasan, sedangkan konsultasi tindak lanjut dilaksanakan oleh Sub bagian Program dan Tindak Lanjut. Dengan terbentuknya layanan Konsultasi Pengawasan ini, Inspektorat akan terbantu dalam mengoptimalkan pengawasan, karena selama ini Inspektorat mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan luasnya Wilayah Kabupaten Sinjai yang menyulitkan bagi APIP dalam memonitoring secara keseluruhan. Dengan kehadiran Layanan Konsultasi Pengawasan ini sebagai upaya mewujudkan Good dan Clean Governance. Penilaian/asesmen (evaluasi yang dilakukan): Untuk menjamin implementatif dan meningkatkan mutu inovasi MEJA APIP dilakukan monitoring dan evaluasi dan Dalam metode ini, Irban, Auditor dan PPUD bekerja sama untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengatur, dan mengkomunikasikan tujuan untuk kesuksesan layanan konsultasi dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan metode S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-sensitive). Metode ini digunakan untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan itu spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sensitif terhadap waktu. Dampak: MEJA APIP berhasil meningkatkan mutu pelayanan konsultasi. Hal ini terlihat dari jumlah OPD yang semakin banyak datang ke inspektorat mengkonsultasikan masalah keuangan maupun administrasinya, disamping itu jumlah temuan dari 2020 mengalami penurunan pada tahun 2022 ini menjadi indikator bahwa fungsi

layanan konsultasi pengawasan dari inspektorat dapat dikatakan berhasil sebab tolak ukur keberhasilan inspektorat dinilai dari semakin sedikitnya jumlah temuan dan nilai kerugian keuangan negara, dapat dilihat Pada tahun 2020 jumlah temuan sebanyak 15, dengan kerugian negara menghampiri 2 milyar dan pada tahun 2021 jumlah temuan sebanyak 98 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2 milyar, memasuki 2022 jumlah temuan 37 dengan kerugian keuangan negara sebesar 995 Juta. MEJA APIP telah memberikan hasil jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelum adanya inovasi. Ini menunjukkan, MEJA APIP sangat berpengaruh terhadap peningkatan fungsi pengawasan pada inspektorat.

Link

https://drive.google.com/file/d/1mIALdsiSWWGBfFPmKrQsU6ZZ_gwc4K_/view?usp=share_link

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Kontribusi nyata yang dapat diukur terhadap capaian TPB: Tujuan TPB ke-16 memiliki target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, dalam segi pelaporan keuangan Pada tahun 2015 laporan keuangan 71% kementerian/lembaga, 85% provinsi, 54% kabupaten dan 65% kota di Indonesia mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ditahun yang sama Indeks Perilaku Anti Korupsi dari skala 0 sampai 5, Indonesia berada pada nilai 3,59%. MEJA APIP memberikan kontribusi nyata yang selaras dengan tujuan TPB dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan hadirnya MEJA APIP mendorong pemerintahan kabupaten sinjai dalam mewujudkan clean governance, disamping itu jumlah temuan dari 2020 mengalami penurunan pada tahun 2022 ini menjadi indikator bahwa fungsi layanan konsultasi pengawasan dari inspektorat dapat dikatakan berhasil sebab tolak ukur keberhasilan inspektorat dinilai dari semakin sedikitnya jumlah temuan dan nilai kerugian keuangan negara, Pada 2020 jumlah temuan sebanyak 15, kerugian negara 2 milyar dan pada 2021 jumlah temuan 98 kerugian sebesar 1,8 milyar, memasuki 2022 jumlah temuan 43 kerugian sebesar 995 Juta.

Link -

5. Adaptabilitas

Adaptabilitas Inovasi layanan konsultasi ini sangat berpotensi diterapkan di inspektorat pada daerah lain atau di kabupaten lain, sebab terbukti mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi yang ingin mengkonsultasikan baik pengelolaan keuangan, administrasi ataupun tata kelola pemerintahan desa dan dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Layanan konsultasi pengawasan ini merupakan implementasi dari APIP dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Ide dalam inovasi MEJA APIP dapat dengan mudah dialihkan dan diterapkan di tempat lain. Inovasi ini membuat OPD, DESA dan Unit kerja lainnya untuk mendekat dengan APIP. Tantangan penerapan strategi aksi MARI MENDEKAT harus ditunjang dengan SDM APIP yang mempunyai dalam memberikan solusi terkait masalah yang akan di konsultasikan oleh DESA, OPD dan Unit kerja lainnya. Selain layanan konsultasi, inovasi MEJA APIP juga menerapkan pelayanan Asistensi dan Sosialisasi. Meja Apip dapat dikatakan merupakan inovasi pelayanan publik yang kreatif dan inovatif karena melakukan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan, dengan mengurangi peran audit ataupun watch dog atau pencari kesalahan melainkan mencegah terjadinya potensi kesalahan dengan menjadikan desa, Opd dan Unit kerja lainnya sebagai mitra, dan menyediakan diri sebagai fasilitator dan layanan help desk.

Link -

6. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan: Sumber daya keuangan layanan konsultasi berasal dari anggaran Asistensi/Pendampingan sesuai dengan SK PKPT tahun 2021, yang jumlah anggaran perwilayahnya

senilai Rp 16.375.000. Sumber daya manusia yang terlibat dalam strategi aksi MARI MENDEKAT adalah APIP yang dibagi dalam bentuk TIM kemudian, TIM terdiri dari beberapa personel untuk melayani peserta konsultasi. Sumber daya peralatan atau material adalah front office dan Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai yang digunakan sebagai wadah dalam melangsungkan layanan konsultasi Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut: Inovasi MEJA APIP mulai diterapkan pada tahun 2020 dan tetap berjalan hingga sekarang. Hal ini didukung oleh sistem pelayanan konsultasi yang mudah diakses oleh OPD dan unit kerja lainnya. Strategi institusional: Layanan konsultasi ini sejalan dengan tujuan dan sasaran inspektorat daerah sinjai untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta berkinerja baik dalam memberikan pelayanan. Inovasi ini juga mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sinjai dalam Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Dampak dari hadirnya layanan inovasi MEJA APIP terlihat signifikan terhadap peningkatan mutu fungsi consulting pada inspektorat. Untuk menjaga kelangsungan program, telah disusun peraturan: 1. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 34 tahun 2021 tentang Pembentukan Klinik konsultasi pengawasan pada inspektorat daerah 2. Keputusan Inspektur daerah kabupaten sinjai nomor 23b tahun 2021 pedoman kegiatan konsultasi, asistensi dan sosialisasi inspektorat daerah kabupaten sinjai Strategi manajerial: Inspektorat membuat kebijakan dalam pelaksanaan layanan konsultasi, serta meningkatkan SDM APIP melalui berbagai diklat teknis substansi guna mendukung penerapan layanan konsultasi dan asistensi yang lebih maksimal. Strategi sosial: APIP membangun komitmen dan kerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemerintah dalam Mengimplementasikan MEJA APIP antara lain yang menjadi skala prioritas adalah Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai . Faktor Kekuatan: 1. Adanya struktur organisasi Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai yang dituangkan kedalam Peraturan-Peraturan Bupati Sinjai Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat. 2. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap Kegiatan Pengawasan. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap kegiatan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, telah disahkan dan ditandatangani Piagam Audit (Internal Audit Charter/IAC) yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam kegiatan pengawasan. 3. Dukungan Dan Partisipasi Tenaga Fungsional Keberhasilan dalam pelaksanaan konsultasi pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tidak terlepas dari peran tenaga Fungsional dalam hal ini Auditor dan PPUPD 4. Dukungan Dana Alokasi dana APBD Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diporsikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

Link -

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Kolaborasi Pemangku Kepentingan Inovasi MEJA APIP Dalam menjalankan pelayanan konsultasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai menjalin berbagai kolaborasi dengan beberapa instansi antara lain yaitu : -KPK Pelaksanakan kolaborasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dengan KPK melalui MCP yang dimana MCP berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, -BPK RI Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai berkolaborasi dengan BPK RI Terkait Hal Tindak Lanjut yang dimana Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan dalam konsultasi pengawasan terhadap rekomendasi dari hasil konsultasi pengawasan. -BPKP Dan Kemendagri Kolaborasi Yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dengan BPKP dan Kemendagri pengembangan dan peningkatan SDM APIP dalam hal ini sebagai Pusat Diklat, Selain sebagai pusat diklat BPKP dan Kemendagri juga merupakan lembaga Pembina terhadap inspektorat. Dari berbagai kolaborasi diatas tersebut dapat

memaksimalkan upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang menyebabkan adanya temuan dan kerugian negara.

Link -